

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2011

BAB 1

PENDAHULUAN

Mencermati berbagai kebijakan Pemerintah Pusat, terutama pada bidang Pengelolaan keuangan, maka dalam masa transisi kebijakan penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari keputusan menteri dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Catatan Atas Laporan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2011, merupakan gambaran ringkasan pencapaian kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah bagian dari pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Hal ini sesuai yang diamanahkan pasal 184 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 81 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010.

Selain ketentuan Perundang – undangan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 sekaligus merupakan sinkronisasi dari berbagai ketentuan perundang - undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga merupakan satu kesatuan (Omnibus regulation) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tersebut kemudiaan ditindak lanjuti dengan petunjuk teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedomaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berbagai Paket Peraturan Perundang – undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah antara lain, Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Undang– undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara, Undang - undang nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Undang – undang nomor 25 tahun 2005 tentang

sistem perencanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tersebut diatas secara signifikan telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat (*Public Services*). Pemerintah maupun Pembangunan. hal tersebut diatas berimbas pada penataan dan restrukturisasi kondisi sosial ekonomi di daerah. Pemerintah Daerah tidak hanya dituntut bertanggung jawab dalam hal keuangan (*Financial Accountability*) tetapi juga berdasarkan kaidah – kaidah yang baik (*Best Practices*). bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*Performance Accountability*). untuk itu efektifitas dan transparansi dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah perlu terus ditingkatkan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di daerah ini sebagai bagian dari Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dapat menjadi kenyataan dimasa mendatang.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah kewajiban kepala Daerah sesuai yang diamanahkan dalam pasal 184 ayat (1) Undang – undang nomor 32 tahun 2004 yaitu : Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pertanggungjawaban adalah hal yang sangat penting karena didalamnya mengandung pesan kepada Publik dan juga amanah yang telah dilaksanakan oleh kepala Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan Rumah Sakit yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahtera Sosial Republik Indonesia Nomor : 239/MENKES-KESOS/SK/III/2001 telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Klas B Pendidikan yang berlokasi di Jl. Dr. Gumbreg No. Purwokerto. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto terletak di wilayah barat selatan Jawa Tengah yang merupakan rumah sakit rujukan masyarakat Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Pemalang, Brebes, Tegal dan Pekalongan.

Dengan demikian selaku Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto berkewajiban memberikan Entitas Laporan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, disusun dalam bentuk satu kesatuan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011, Neraca per 31 desember 2011, Laporan Arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2011, dan Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2011.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun maksud disusunnya Laporan Keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo selaku satuan kerja pengelola keuangan Daerah (SKPD) adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan handal mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam tahun anggaran 2011 sehingga efektivitas, efisiensi, dan kondisi keuangan suatu entitas / SKPD dapat dievaluasi dan dinilai.

Secara garis besar tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sebagai bagian dari laporan keuangan daerah adalah :

- a. Untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan baik dibidang ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bahan bukti pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b. Untuk memberikan informasi kinerja SKPD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo yang berhubungan dengan anggaran / keuangan daerah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi baik dari segi manajerial maupun organisasi untuk perbaikan kinerja SKPD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dimasa yang akan datang.

Sedangkan secara khusus penyajian CALK adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai ringkasan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta kinerja keuangan selama priode akuntansi tahun 2011.
- b. Memberi informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya *financial* jangka pendek.
- c. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit kerja pemerintah dan perubahan – perubahan yang terjadi didalamnya, dalam satu tahun anggaran.
- d. Memberikan Informasi keuangan untuk memonitor kinerja, dan kesesuaian nya dengan peraturan perundang – undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang telah disyaratkan.
- e. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran serta untuk memprediksi pengaruh pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
- f. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi, antara lain :
 1. untuk menentukan biaya pelaksanaan program, fungsi dan aktivitas suatu satker sehingga mempermudah dalam melakukan analisis dan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintahan yang lain;
 2. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektifitas terhadap pencapaian tujuan serta target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010;
- 12) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059 / 76 / 2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- 13) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sistematika isi catatan atas laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

- BAB II. Ekonomi Makro. Kebijakan Keuangan. dan Pencapaian Target Kinerja
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan

- BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.2 Analisis Laporan Keuangan
 - 3.3 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasar Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Aset
 - 5.1.4 Kewajiban
 - 5.1.5 Ekuitas Dana

BAB VI. Penutup

BAB II

Ekonomi Makro. Kebijakan Keuangan. dan Pencapaian Target Kinerja APBD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintah Daerah. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- Tingkat daya beli masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan.
- Adanya persiapan dengan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang kompetitif, baik dari tarif dan bentuk pelayanan.
- Adanya globalisasi dilingkungan jasa pelayanan kesehatan yang ditandai dengan masuknya/ didirikannya Rumah Sakit Berstandar Internasional (International Hospital).
- Tingkat inflasi yang belum stabil/Fluktuatif yang menyebabkan kenaikan harga-harga bahan baku rumah sakit (antara lain : obat-obatan, alat kesehatan, bahan penunjang lainnya, dll)

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan yang baik pendapatan dan belanja di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tahun anggaran 2011 agar terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran, dan manfaat serta disiplin anggaran maka diambil langkah-langkah kebijakan keuangan berupa :

- Pengembangan jenis/produk dan cakupan pelayanan dalam rangka peningkatan potensi-potensi pendapatan rumah sakit
- Peningkatan cost recovery dalam rangka menciptakan kemandirian secara finansial.
- Pengendalian belanja/biaya rumah sakit (*Cost Contiment Strategy*) dengan memperbaiki etos kerja karyawan rumah sakit.
- Pemberlakuan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang berbasis akrual.
- Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi dengan teknologi komputer (*Computerized*).
- Penyesuaian tarif berdasarkan peraturan daerah dengan memperhitungkan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat serta daya saing pengguna jasa pelayanan kesehatan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto meliputi capaian program kegiatan, masukan, keluaran, dan hasil. Yang dimaksud capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan diantaranya :

- Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan penunjang untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan maksimal (contoh : alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, reagen, pemeliharaan rutin sarana prasarana baik medis maupun non medis, dll)
- Tercapainya BOR, LOS, TOI, GDR, dan NDR sesuai dengan yang direncanakan.
- Terpenuhiya target pendapatan tahun anggaran 2011 dan efisiensi dalam pembelanjaan rumah sakit pada tahun anggaran 2011.
- Peningkatan status rumah sakit dari kelas B pendidikan menjadi kelas A Pendidikan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2011, realisasi pendapatan seluruhnya berjumlah Rp. 158.501.776.407 atau 117,41% dari target Anggaran Pendapatan yang direncanakan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 135.000.000.000 Hal ini berarti melebihi target penerimaan sebesar Rp 23.501.776.407 atau 17,41% Realisasi pendapatan itu terdiri dari pendapatan operasional Rp 154.469.432.326 dan pendapatan non operasional sebesar Rp 4.032.344.081.

2. Realisasi Belanja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Realisasi belanja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran berakhir seluruhnya berjumlah Rp.235.498.989.055 atau 95,84% dari target Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.245.733.531.000 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 42.537.323.203 atau 94,12% dari target Anggaran Belanja Tidak Langsung yaitu sebesar Rp.45.193.746.000 dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.192.961.665.852 atau 96,22% dari target Anggaran Belanja Langsung yaitu sebesar Rp.200.539.785.000.

3.2 Analisis Laporan Keuangan

Dalam menganalisis laporan keuangan adalah dengan menghitung rasio keuangan yaitu perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Terdapat berbagai macam analisis rasio keuangan, antara lain :

3.2.1 Analisis Likuiditas

Analisis Likuiditas menunjukkan kemampuan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk menganalisis likuiditas dengan menggunakan rasio-rasio keuangan antara lain :

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, rasio ini menunjukkan apakah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo memiliki asset yang mencukupi untuk melunasi utangnya.

Current Ratio

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \\ &= \frac{68,599,921,392}{5,807,075,475} \\ &= 11.81 \end{aligned}$$

Tingkat rasio lancar sebesar 11.81 dianggap sangat baik, karena setiap Rp.1,00 utang lancar RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo akan dijamin oleh Rp. 11.81 aktiva lancar.

2. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Membandingkan antara kas yang tersedia di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo ditambah efek yang segera diuangkan (Investasi Jangka Pendek) dibagi dengan utang lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

Cash Ratio

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \\ &= \frac{20,579,687,775}{5,807,075,475} \\ &= 3.54 \end{aligned}$$

Tingkat Rasio kas sebesar 3.54 dianggap sangat baik, karena setiap Rp.1,00 utang lancar RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo akan dijamin oleh Rp3.54 kas dan setara kas yang ada.

3. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio cepat ini mengindikasikan apakah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dapat membayar utangnya dengan cepat. Rasio ini juga menunjukkan berapa alat likuiditas yang paling cepat yang bias digunakan untuk melunasi utang lancar. Dalam hal ini persediaan dianggap kurang cepat untuk membentuk kas, karena pada umumnya memerlukan dua tahap lagi untuk mengubahnya menjadi kas. Pertama, menjual dan menjadi piutang. Kedua, menagih piutang sehingga menjadi kas, misalnya piutang dan surat berharga. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka akan semakin tinggi tingkat likuiditasi keuangan. Nilai yang dianggap baik adalah 1:1.

Rasio Cepat

$$= \frac{\text{Aktiva Lancar - Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

$$= \frac{44,935,265,060}{5,807,075,475}$$

$$= 7.74$$

Tingkat Rasio Cepat sebesar 7.74 berarti bahwa setiap Rp.1,00 utang lancar RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo akan dijamin oleh Rp. 7.74 aktiva yang lebih lancar.

4. *Working capital to total assets ratio*

Rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto.

Working capital to total assets ratio

$$= \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{Utang Lancar}}{\text{Total Aktiva}}$$

$$= \frac{62,792,845,917}{422,100,326,440}$$

$$= 0.15$$

Tingkat *Working capital to total assets ratio* sebesar 0.15 berarti bahwa setiap Rp.1,00 total aktiva RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo akan dijamin oleh Rp.0.15 modal kerja neto atau aktiva lancar dikurangi utang lancar.

3.2.2 Analisis Solvabilitas

Rasio Solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Rasio Solvabilitas

$$= \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$$

$$= \frac{422,100,326,440}{5,807,075,475}$$

$$= 72.70$$

Tingkat Solvabilitas 72.70 dianggap sangat baik karena setiap Rp.1,00 dari total utang RSUD Prof Dr Margono Soekarjo akan dijamin oleh Rp. 72.70 dari total aktiva.

3.2.3 Analisis Kewajiban (*Leverage*)

Analisis Kewajiban yang digunakan dengan menggunakan Rasio Utang (*Lacerage Ratio*), rasio ini sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dalam membuat keputusan kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dalam membayar utangnya.

1. Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

Rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo terbebani oleh utang. Rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi mengindikasikan bahwa

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo mungkin sudah kelebihan utang, dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar.

Rasio Utang Terhadap Ekuitas

$$= \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

$$= \frac{5,807,075,475}{416,293,250,965}$$

$$= 0.01$$

Tingkat Rasio Utang Terhadap Ekuitas sebesar 0,01 atau 1% total ekuitas menunjukkan bahwa utang RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo masih kecil jika dibandingkan dengan ekuitas dana yang dimiliki.

2. Rasio Utang Terhadap Aset Modal (*Total Debt to Total Capital Assets*)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal/aktiva yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Bagi kreditor rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo untuk melunasi utangnya dengan aset modal yang dimilikinya apabila terjadi kegagalan dalam pembayaran utang.

Rasio Utang Terhadap Aset Modal

$$= \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset Modal}}$$

$$= \frac{5,807,075,475}{353,500,405,048}$$

$$= 0.01$$

Tingkat Rasio Utang Terhadap Aset Modal sebesar 0,01 atau 1% total aset modal menunjukkan bahwa utang RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo masih kecil jika dibandingkan dengan total aset modal yang dimiliki.

3.2.4 Analisis Profitabilitas

1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dalam tahun ke tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

Analisis pertumbuhan pendapatan

$$= \frac{\text{Pendapatan TA. 2011} - \text{Pendapatan TA.2010}}{\text{Pendapatan TA.2010}}$$

$$= \frac{37,135,885,894}{121,365,890,513}$$

$$= 0.31$$

Tingkat pertumbuhan Pendapatan sebesar 0,31 atau 31% menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebesar 31% dari tahun lalu.

2. **Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

- Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan.

Nilai Efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Sangat Efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup Efektif : 90% - 99%
- Kurang Efektif : 75% - 89%
- Tidak Efektif : < 75%

Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Penerimaan PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$
$$= \frac{158,501,776,407}{135,000,000,000}$$
$$= 1.174$$

Rasio efektifitas sebesar 1,174 atau 117,4% menunjukkan bahwa tingkat kemampuan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dalam memobilisasi penerimaan PAD sangat efektif karena diatas 100% yaitu 117,4%.

- Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo untuk memperoleh PAD dengan realisasi pendapatan PAD. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dalam melakukan pemungutan Pendapatan.

Nilai Efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Sangat Efisien : < 10%
- Efisien : 10% - 20%
- Cukup Efisien : 21% - 30%
- Kurang Efisien : 31% - 40%
- Tidak Efisien : > 40%

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Biaya Perolehan PAD
Realisasi Penerimaan PAD

$$= \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$
$$= \frac{152,683,712,208}{158,501,776,407}$$
$$= 0.96$$

Rasio Efisiensi sebesar 0,96 atau 96% menunjukkan bahwa tingkat kemampuan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dalam melakukan pemungutan pendapatan tidak efisiensi karena diatas 40% yaitu 96%.

3.2.5 Analisis Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas menunjukkan sejauh mana efektifitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset.

1. Perputaran Aktiva Tetap

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Tetap}} \\ &= \frac{158,501,776,407}{353,500,405,048} \\ &= 0.448 \end{aligned}$$

Rasio sebesar 0,448 atau 44,8% berarti RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dapat menggunakan 44,8% aktiva tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin besar rasio ini akan semakin baik, hal ini berarti bahwa aktiva tetap dapat lebih cepat berputar dalam menghasilkan pendapatan.

2. Perputaran Total Aktiva (*Fixed Assets Turn Over*)

Rasio untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu tahun

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}} \\ &= \frac{158,501,776,407}{422,100,326,440} \\ &= 0.376 \end{aligned}$$

Rasio sebesar 0,376 atau 37,6% berarti RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dapat menggunakan 37,6% total aktiva nya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin besar rasio ini akan semakin baik.

3. *Working Capital Turn Over*

Working Capital Turn Over adalah rasio untuk menghitung seberapa banyak modal kerja berputar selama satu tahun.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Modal Kerja}} \\ &= \frac{158,501,776,407}{62,887,008,948} \\ &= 2.52 \end{aligned}$$

Tingkat Rasio Working Capital Turn Over sebesar 2.52 berarti perputaran modal kerja sebesar 2.52 kali dalam satu tahun.

4. Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*)

rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan berputar dalam satu tahun.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Penjualan}}{\text{Persediaan}} \\ &= \frac{158,501,776,407}{23,644,656,332} \\ &= 6.70 \end{aligned}$$

Tingkat rasio perputaran persediaan sebesar 6.70 menunjukkan bahwa perputaran persediaan sebesar 6.70 kali dalam satu tahun.

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pencapaian Realisasi Kinerja keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi pencapaian sebesar 96,7%. Hal ini menunjukkan kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sudah baik semua program berjalan dengan baik.

Adapun tabel dari iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah sebagai berikut :

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan keuangan. Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

Jika diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

Basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akrual berarti bahwa transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pengukuran akuntansi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarno yang berkaitan dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari pos-pos laporan keuangan sebagai berikut :

4.3.1 Pendapatan

1. Pengertian

Pengertian Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

2. Klasifikasi Pendapatan

a. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

1) Pengertian

Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan selanjutnya dirinci per jenis layanan yang diperoleh BLU.

2) Pengakuan

Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan.

3) Pengukuran

Pendapatan usaha dari jasa layanan dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

b. Pendapatan Hibah

1) Pengertian

Pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa.

2) Pengakuan

Pendapatan hibah diakui pada saat pendapatan diterima, yaitu pada saat Berita Acara Penyerahan

3) Pengukuran

Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan dan pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLU.

c. Pendapatan APBD

1) Pengertian

Pendapatan yang berasal dari APBD, baik untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

2) Pengakuan

Pendapatan APBD diakui pada saat seharusnya pendapatan diterima, yaitu pada saat SP2D diterima.

3) Pengukuran

Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.

d. Pendapatan APBN

1) Pengertian

Pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.

2) Pengakuan

Pendapatan APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

3) Pengukuran

Pendapatan dari APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM.

e. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lainnya

1) Pengertian

Pendapatan yang diperoleh dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lain yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

2) Pengakuan

Pendapatan diakui pada saat seharusnya pendapatan diterima

f. Pendapatan Lainnya

1) Pengertian

Pendapatan yang berasal dari penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh BLUD, dan hasil investasi.

2) Pengakuan

Pendapatan diakui pada saat seharusnya pendapatan diterima.

3) Pengukuran

Pendapatan usaha lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

4) Pengungkapan

a. Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.

b. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.3.2 Biaya

1. Pengertian

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya Aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih baik merupakan penurunan Aset (amortisasi) atau meningkatnya tanggung jawab (akrual/pembebanan/pengakuan biaya ybs.)

2. Klasifikasi Biaya

a. Biaya Layanan

1) Pengertian

Seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan.

2) Pengakuan

Biaya Layanan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan Aset atau peningkatan kewajiban.

b. Biaya Umum dan Administrasi

1) Pengertian

Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan. Biaya ini antara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, biaya pemeliharaan, biaya langganan daya dan jasa, dan biaya promosi.

2) Pengakuan

Biaya Umum dan Administrasi diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan Aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

c. Biaya Lainnya

1) Pengertian

Merupakan biaya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam biaya layanan dan biaya umum dan administrasi. Biaya ini antara lain meliputi biaya bunga dan biaya administrasi bank.

2) Pengakuan

Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan Aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal.

d. Biaya Tak Terduga

1) Pengertian

Merupakan biaya yang tidak dapat di perkirakan/prediksi sejak awal, biaya yang tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang. Biaya ini antara lain akibat bencana alam, kebakaran, perampokan, pencurian, dan kecelakaan.

2) Pengakuan

Biaya ini diakui setelah kejadian tersebut terjadi dan sudah dihitung dan ditetapkan kerugiannya oleh yang expert (tim ahli penilai).

3. Pengukuran

Biaya dan kerugian dicatat sebesar Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan; Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang; Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan dan Jumlah kerugian yang terjadi.

4. Pengungkapan

Biaya disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis biaya. Rincian jenis biaya diungkapkan pada CaLK.

5. Kapitalisasi Aset

Kapitalisasi adalah batasan dalam penentuan pengeluaran, apakah akan dicatat sebagai suatu Aset tetap atau pengeluaran untuk mendapatkan penghasilan

Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset tetap meliputi :

- a. Pengeluaran untuk satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang corak kesenian.

4.3.3 Aset

1. Pengertian Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang.

2. Klasifikasi Aset

a. Aset Lancar

1) Pengertian

Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan atau dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca.

2) Klasifikasi Aset Lancar

a) Kas dan Setara kas

(1) Pengertian

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari Aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

(2) Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLU.

(3) Pengukuran

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- b. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.

b) Piutang

(1) Pengertian

Hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional.

(2) Pengakuan

Piutang diakui pada saat barang atau jasa diserahkan atau hak untuk menagih.

(3) Pengukuran

- a. Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- b. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau prosentase dari pendapatan.

Tabel :

No.	Umur Piutang	Persentase
1.	0 – 1 Tahun	20%
2.	1 – 5 Tahun	70%
3.	Diatas 5 Tahun	100%

- c. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku (dimana piutang yang lebih dari 5 (lima) tahun diajukan ke Gubernur untuk persetujuan penghapusan piutang).

(4) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Piutang usaha yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang usaha yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.
- b. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.
- c. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
 - i. rincian jenis dan jumlah piutang;
 - ii. jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - iii. jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang;
 - iv. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang;
 - v. jumlah piutang yang dijadikan agunan;
 - vi. jumlah piutang yang dijual (anjak piutang).

c) Persediaan

(1) Pengertian

Persediaan adalah Aset yang diperoleh dengan maksud untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, digunakan dalam proses produksi dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*).

(2) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau dihasilkan dan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa, atau rusak.

(3) Pengukuran

Persediaan diukur berdasarkan sebesar harga perolehannya, dan untuk penyimpanannya dengan menggunakan metode MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), dan penjualannya berdasarkan harga terakhir (harga pasar). Persediaan perlengkapan (*supplies*) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLU dinilai sebesar harga perolehannya.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Persediaan disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- b. Persediaan yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai perolehan atau nilai realisasi bersih (*the lower of cost and net realizable value*).
- c. Persediaan perlengkapan (*supplies*) habis pakai yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan operasional BLU disajikan sebesar harga perolehannya.
- d. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain:
 - i. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - ii. jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca;
 - iii. jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan selama periode;
 - iv. kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan;
 - v. nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.

d) Uang Muka

(1) Pengertian

Menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan dan uang muka pembelian barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk suatu kegiatan mendesak yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggung-jawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang muka pembelian barang/jasa adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima. Pembayaran di muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

(2) Pengakuan

Uang muka diakui pada saat pembayaran, uang muka kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

(3) Pengukuran

Uang muka diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Uang muka disajikan pada kelompok aset lancar di neraca.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain rincian jenis dan jumlah uang muka serta batas waktu pertanggungjawaban.

e) Biaya di Bayar di Muka

(1) Pengertian

Pembayaran di muka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar di muka berfungsi untuk membiayai operasional jangka, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar di muka.

(2) Pengakuan

Biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran, diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima, dan berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu

(3) Pengukuran

Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang diterima.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- b. Biaya dibayar di muka disajikan secara netto.

b. Aset Tidak Lancar

1) Pengertian

Aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dan tidak memenuhi kriteria Aset lancar.

2) Klasifikasi Aset Tidak Lancar

a) Investasi Jangka Panjang

(1) Pengertian

Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti

pemberian pinjaman kepada perusahaan negara/daerah, investasi dalam bentuk dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non-permanen lainnya.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

(2) Pengakuan

Investasi jangka panjang diakui pada saat keluarnya sumber daya ekonomi BLU untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan andal.

(3) Pengukuran

Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dalam hal ini dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual dan Investasi Non Permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

- a) Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset tidak lancar pada neraca.
- b) Pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan adalah untuk hal-hal sebagai berikut :
 - i. rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
 - ii. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dari investasi;
 - iii. pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan;

b) Aset Tetap

(1) Pengertian

Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu tahun.

(2) Pengakuan

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dengan nilai minimal Rp. 300.000,-, biaya perolehan Aset tetap dapat diukur secara andal, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

(3) Pengukuran

Aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan dan apabila penilaian Aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar oleh tim (apabila belum ada nilai dari Aset itu) pada saat perolehan .

(4) Metode Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus dikurangi nilai residu. Berikut ini daftar jenis, masa manfaat dan nilai penyusutan Aset tetap :

Jenis Aset tetap	Estimasi Masa Manfaat/Umur	% Penyusutan dari Harga Perolehan dari residu
Tanah.	Tidak Terbatas	0 %
Gedung dan Bangunan.	20 tahun	5 %
Peralatan dan Mesin :		
- Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	4 Tahun	25%
- Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.	4 Tahun	25%
- Peralatan Kedokteran.	16 Tahun	6,25 %
- Peralatan Laboratorium.-	16 Tahun	6,25%
- Kendaraan dan Alat angkut	10 Tahun	10%
Jalan, Jaringan dan Instalasi	16 Tahun	6,25%
Aset Tetap lainnya :		
- Buku Perpustakaan.	4 Tahun	25%
- Barang Bercorak Kesenian/ Budaya.	4 Tahun	25%

Keterangan :

1. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibangun atau dibeli dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Peralatan dan mesin yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai perolehan minimal atau sama dengan Rp. 300.000 dan dalam kondisi siap digunakan , mencakup :
 - a. Peralatan dan perlengkapan kantor seperti peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubeler, dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.
 - b. Peralatan dan perlengkapan rumah tangga seperti alat angkut, alat bengkel, alat dapur, Penghias ruang rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi, dan peralatan dan perlengkapan RT lainnya.
 - c. Peralatan kedokteran meliputi peralatan kedokteran dan peralatan kedokteran lainnya.

- d. Peralatan laboratorium meliputi peralatan laboratorium Klinik dan Anatomi
- 3. Jalan, Jaringan dan Instalasi meliputi jaringan irigasi, Instalasi listrik, dan Instalasi telepon.
- 4. Aset tetap mencakup Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan Aset tetap diatas meliputi koleksi buku / perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan budaya.

(5) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Aset tetap disajikan pada pos aset non lancar pada neraca.
- b. Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap.
- c. Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
- d. Aset yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha (*leasing*) disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok tersendiri.
- e. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:
 - i. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan;
 - ii. metode penyusutan yang digunakan;
 - iii. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - iv. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
 - v. nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang memperlihatkan:
 - a) penambahan;
 - b) pelepasan;
 - c) revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah;
 - d) penurunan nilai tercatat;
 - e) penyusutan;
 - f) setiap pengklasifikasian kembali.
 - vi. eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang;
 - vii. kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tetap;
 - viii. uraian rincian dari masing-masing aset tetap;
 - ix. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

c) Aset Lainnya

(1) Pengertian

Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu tahun.

(2) Pengakuan

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; Biaya perolehan Aset tetap dapat diukur secara andal; Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

(3) Pengukuran

Dicatat sebesar biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut sampai siap pakai.

(4) Penyajian dan Pengungkapan

- a. Aset lainnya disajikan setelah aset tetap.
- b. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan. Dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.

4.3.4 Kewajiban

1. Pengertian

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi.

2. Klasifikasi Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek.

1) Pengertian

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

2) Pengakuan.

Utang usaha diakui pada saat menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi belum membayar atas barang/jasa yang diterima; Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan untuk membayar pajak kepada Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat telah menerima manfaat ekonomis dari pihak tetapi belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima.

3) Pengukuran

Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal kewajiban jangka pendek.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek.

Utang BLU diungkapkan secara rinci dalam CaLK. Informasi-informasi yang diungkapkan dalam CaLK antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasi berdasarkan pemberi pinjaman (kreditur);
 - b. Bunga pinjaman yang terutang dan tingkat bunga yang berlaku.
 - c. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
- 1) Pengertian
Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 - 2) Pengakuan
Kewajiban jangka panjang diakui pada saat BLU menerima hak dari pihak lain tetapi BLU belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.
 - 3) Pengukuran
Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang.
 - 4) Penyajian dan Pengungkapan
 - a. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian utang yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
 - b. Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek.
 - c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK antara lain sebagai berikut:
 - i. jumlah rincian jenis utang jangka panjang;
 - ii. karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman;
 - iii. Jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
 - iv. hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi.

4.3.5 Ekuitas

1. Pengertian

Hak residual BLU atas Aset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki.

2. Klasifikasi Ekuitas

a. Ekuitas Tidak Terikat

1) Pengertian

Ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

2) Pengakuan

Ditetapkannya nilai kekayaan BLU; Diterimanya dana sumbangan/ bantuan yang tidak mengikat; Diterimanya Aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat; Pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

3) Pengukuran

Nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan BLU; Nominal dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat; Nilai perolehan atau nilai wajar Aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal; dan Jumlah dana/nilai wajar Aset yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

- i. Rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan jenisnya;
- ii. Informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat.

b. Ekuitas Terikat Temporer

1) Pengertian

Ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur.

2) Pengakuan

Ditetapkannya nilai kekayaan BLU; Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer; Diterimanya Aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer.

3) Pengukuran

Ekuitas terikat temporer dinilai sebesar Nilai buku ekuitas terikat temporer pada saat penetapan BLU; Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat temporer.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas terikat temporer disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

- i. Rincian jumlah ekuitas terikat temporer berdasarkan jenisnya;
- ii. Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat temporer.

c. Ekuitas Terikat Permanen

1) Pengertian

Ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donatur.

2) Pengakuan

Ditetapkannya nilai kekayaan entitas pada saat ditetapkan untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU; Diterimanya dana dan/atau Aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara permanen; Digunakannya Aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

3) Pengukuran

Ekuitas terikat permanen dinilai sebesar nilai buku ekuitas terikat permanen pada saat penetapan BLU; Nominal dana sumbangan/bantuan yang sifatnya mengikat permanen; Nilai perolehan atau nilai wajar Aset sumbangan/bantuan yang terikat permanen mana yang lebih andal; dan Nilai tercatat Aset yang digunakan untuk investasi.

4) Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas terikat permanen disajikan dalam kelompok Ekuitas pada Neraca sebesar saldonya. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut:

- i. Rincian jumlah ekuitas terikat permanen berdasarkan jenisnya;
- ii. Informasi mengenai sifat dan pembatasan ekuitas terikat permanen.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengacu sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 80 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan sepenuhnya menerapkan dasar Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.

BAB V
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos laporan keuangan

	K E T E R A N G A N		31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
5.1.1 Pendapatan			Rp. 158.501.776.407	Rp. 121.365.890.513

Pendapatan yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan pelayanan yang diterima oleh bendahara penerima BLUD sampai dengan 31 Desember 2011.

Uraian	0	0
Pendapatan dari pengembalian		
Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD	155.403.067.326	121.065.587.763
Penerimaan Pemakaian Kekayaan Daerah BLUD	253.020.250	300.302.750
Penerimaan lainnya	2.845.688.831	
Jumlah	158.501.776.407	121.365.890.513
Pemindahbukuan		
Jumlah	158.501.776.407	121.365.890.513

5.1.2 Belanja	Rp. 235.530.014.055	Rp. 184.526.253.104
---------------	---------------------	---------------------

Belanja yang dimaksud dalam laporan realisasi anggaran adalah realisasi berdasarkan SPJ belanja baik APBD maupun BLUD sampai dengan 31 Desember 2011.

Belanja APBD :

1. Belanja Pegawai

Uraian	2011	2010
Belanja tidak langsung	42.537.323.203	36.814.758.529
Belanja langsung	372.300.000	438.050.000
Jumlah	42.909.623.203	37.252.808.529

2. Belanja barang dan jasa

Uraian	2011	2010
Belanja Bahan Habis Pakai	-	675.631.000
Belanja Bahan / Material	-	11.041.321.727
Belanja Makanan dan Minuman	-	1.654.617.118
Belanja Jasa Kantor	13.155.725.844	3.076.525.246
Belanja Cetak dan Penggandaan	-	
Jumlah	13.155.725.844	16.448.095.091

3. Belanja Modal

Uraian	2011	2010
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	10.540.416.500	8.055.711.699
BM Pengadaan Peralatan Kantor	466.816.000	
BM Pengadaan Perlengkapan Kantor	92.730.000	
BM Pengadaan Komputer	282.005.500	
BM Pengadaan Meubelair	1.334.000.000	
BM Pengadaan Peralatan Dapur	59.115.000	
BM Pengadaan Alat-alat Kedokteran	8.305.750.000	
Belanja Modal Konstruksi Gedung dan Bangunan	3.047.548.000	5.377.856.000
Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap lainnya		-
Belanja Modal Pengadaan Aset lainnya	-	-
Jumlah	13.587.964.500	13.433.567.699

Belanja BLUD :

Uraian	2011	2010
1. BELANJA OPERASIONAL		
A. BELANJA PELAYANAN		
1. Belanja Pegawai	8.277.288.390	5.585.532.915
2. Belanja Bahan	69.769.187.590	41.186.695.379
3. Belanja Jasa Pelayanan	46.258.606.786	40.173.422.056
4. Belanja Pemeliharaan	2.558.277.131	1.819.640.477
5. Belanja Barang dan Jasa	2.421.526.552	2.330.249.739
6. Belanja Pelayanan Lain-lain	-	
Jumlah	129.284.886.449	91.095.540.566

B. BELANJA UMUM DAN ADMINISTRASI		
1. Belanja Pegawai	2.236.394.823	1.917.496.735
2. Belanja Administrasi Kantor	6.601.124.435	5.261.164.501
3. Belanja Pemeliharaan	8.402.377.016	8.009.149.100
4. Belanja Barang dan Jasa	5.329.964.043	3.980.857.961
5. Belanja Promosi	543.537.343	510.121.697
6. Belanja Lain-lain	260.665.901	259.308.900
Jumlah	23.374.063.561	19.938.098.894

K E T E R A N G A N			31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010
2. BELANJA MODAL				
Uraian		2011	2010	
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin		12.417.371.000	6.336.148.325	
BM Pengadaan Alat-alat Bengkel		1.432.000.000		
BM Pengadaan Peralatan Kantor		952.258.000		
BM Pengadaan Perlengkapan Kantor		140.947.000		
BM Pengadaan komputer		423.616.000		
BM Pengadaan Meubelair		436.350.000		
BM Pengadaan Alat-Alat Kedokteran		9.032.200.000		
Belanja Modal Konstruksi Gedung dan Bangunan		775.617.300		
Pembuatan Tangga Geriatri		97.625.000		
Renovasi Dinding Peredam Aula Pringgondani		98.671.000		
Renovasi Perkantoran		99.337.000		
Renovasi Rawat Jalan LT.II & Ruang Rawat		96.000.000		
Renovasi ICU/ICCU		97.902.700		
Pembuatan Selasar Penghubung		98.434.600		
Pembuatan Atap Lorong		93.170.000		
Pemasangan Peredam Aula Amarta		94.477.000		
Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-		
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap lainnya		24.762.198	21.994.000	
Belanja Modal Pengadaan Aset lainnya				
Jumlah		13.217.750.498	6.358.142.325	

5.1.3 Aset

1. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD

Rp.261.029.962Rp.110.248.034

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas pada bendahara penerima BLUD 31 desember 2011.

Uraian	2011	2010
Rekening Bank Jateng 300223007	22.744.389	110.248.034
Kas Ditangguhkan di Bendahara Penerimaan	238.285.573	
Jumlah	261.029.962	110.248.034

Saldo kas di Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp. 261,029,962 merupakan penerimaan pendapatan retribusi pelayanan yang belum disetor per 31 Desember 2011.

Saldo sebesar Rp.238,285,573 merupakan pendapatan pelayanan pada tanggal 31 Desember 2011 yang diterima kasir rawat inap setelah jam 02.00 siang dan diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan di rekening bendahara Pengeluaran BLUD.

*) bukti R/K terlampir

2. Kas di Bendahara BLUD

Rp.20.318.657.813Rp.37.044.595.901

Kas BLUD adalah Jumlah saldo kas tunai dan yang ada direkening Bendahara Pengeluaran BLUD di bank Jateng Cab. Purwokerto dengan No. Rek : 1-003-00163-2, yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran BLUD tidak termasuk dana yang berasal dari APBD sampai dengan penerimaan 31 desember 2011.

Kas BLUD RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

Uraian	2011	2010
Rekening Bank Jateng 1003001632	20.316.625.921	37.044.595.901
Tunai	2.031.892	
Jumlah	20.318.657.813	37.044.595.901

Saldo sebesar Rp. 20,316,625,921 merupakan uang yang digunakan untuk membayar Kewajiban jangka pendek bulan Desember sebesar Rp. 4,520,238,520 dan Kebutuhan operasional bulan Januari 2012 sebesar Rp. 15,796,387,401.

*) bukti R/K terlampir dan Laporan Arus Kas Bendahara Pengeluaran.

3. Kas Di Bendahara Pengeluaran APBD

Rp.-Rp.-

Kas Di Bendahara Pengeluaran APBD per tanggal 31 Desember 2011.

Uraian	2011	2010
Kas Non SILPA	-	-
Jumlah	-	-

Uang Persediaan Bulan Desember 2011 sebesar Rp. 13,347,000 sudah tidak dipergunakan lagi dan telah disetorkan ke Kas Daerah dengan No. STS : 01/XII/2011 ke Rekening No. 1034-01504-7

*) bukti R/K terlampir

4. Piutang Retribusi Pelayanan

Rp.25.739.233.435Rp.15.346.085.364

Piutang retribusi adalah pendapatan retribusi pelayanan yang sudah menjadi hak RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2011 belum dibayar oleh pihak ketiga/wajib bayar.

Rincian piutang sebagai berikut :

Uraian	2011	2010
A. Piutang Pasien Umum	3.352.258.730	2.567.274.759
B. Piutang Pasien Dengan Jaminan /Askes :	22.386.974.705	12.778.810.605
Piutang Askes Sosial	7.276.388.904	2.598.315.066
Piutang Askes Komersial/Inhealth	148.553.055	56.753.523
Piutang Jamsostek	165.419.782	203.293.580
Piutang Jamkesmas in Kuota	12.553.968.978	6.441.268.414
Piutang Jamkesmas out Kuota	2.242.643.986	3.479.180.022
Piutang Lain yang dijamin pihak ketiga	-	-
Jumlah	25.739.233.435	15.346.085.364

Ada koreksi saldo awal karena ada penambahan Piutang Umum sebesar Rp. 98,847,931, Penambahan Piutang Jamkesmas In- Kuota sebesar Rp. 6,967,463,337 dan Penambahan Piutang Jamkesmas Out Kuota sebesar Rp. 1,305,969,072 dikarenakan ada susulan tambahan klaim dari pihak ketiga.

*) Rincian Piutang terlampir.

5. Piutang Tak Tertagih	Rp.	(1.664.596.620)	Rp.	-
Uraian	2011	2010		
Piutang Tak Tertagih	(1.664.596.620)	-		
Jumlah	(1.664.596.620)	-		

Saldo Sebesar Rp(1.664.596.620) merupakan saldo Cadangan Piutang Tak Tertagih yang dikelola oleh RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan dimungkinkan tidak tertagih per 31 Desember 2011. Kebijakan pencadangan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Persediaan	Rp.	23.664.656.332	Rp.	18.433.290.234
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kegiatan operasional Rumah Sakit,				

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Barang per 31 Desember 2011, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2011	2010
Persediaan Bahan Habis Pakai / BHP	5.494.182.027	2.754.879.419
Persediaan Obat-obatan	18.170.474.305	15.678.410.815
Jumlah	23.664.656.332	18.433.290.234

Persediaan ini merupakan barang berwujud yang akan habis pakai atau terjual namun saat tanggal neraca disusun masih belum habis terpakai atau terjual.
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
Persediaan disajikan sebesar :
- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh
Untuk rincian persediaan Terlampir.

7. Aset	Rp.	353.500.405.048	Rp.	341.617.659.031
Aset Tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan nilai aset diambil dari hasil rekonsiliasi Pengurus Barang dengan Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).				

*) Lihat Tabel Rekapitulasi Mutasi Barang Inventaris di lampiran

Rincian aset selama 2011 adalah sebagai berikut :

Uraian	2011	2010	Kenaikan
Tanah	105.738.750.000	103.938.750.000	1.800.000.000
Peralatan dan Mesin	145.401.705.945	138.763.803.541	6.637.902.404
Gedung dan Bangunan	99.854.080.137	95.902.528.300	3.951.551.837
Jalan, Irigasi dan Jaringan komputer	2.308.930.958	2.840.323.380	(531.392.422)
Aset Tetap Lainnya	196.938.008	172.253.810	24.684.198
Jumlah	353.500.405.048	341.617.659.031	11.882.746.017

Selama Tahun Anggaran 2011 ada kenaikan Aset Tetap Senilai Rp. 11,882,746,017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Mutasi Perubahan Penambahan Aset Tetap :	Rp	29.096.846.998
- Belanja Modal APBD dan BLUD	26.805.706.998	
- Koreksi	2.029.430.000	
- Hibah	261.710.000	
2. Mutasi Perubahan Pengurangan Aset Tetap	Rp	17.214.000.981
Jumlah (1-2)	Rp	11.882.846.017

Penjelasan Mutasi Perubahan Aset Tetap Tahun Anggaran 2011

1. Penjelasan Mutasi perubahan Penambahan Aset Tetap selama 1 Januari s/d 31 Desember 2011

Penambahan aset tetap selama tahun anggaran 2011 yang berasal dari belanja Aset Tetap menggunakan dana APBD dan BLUD sebesar :

Uraian	APBD	BLUD	TOTAL
Belanja Peralatan dan Mesin :	10.540.416.500	12.417.363.000	22.957.779.500
BM Pengadaan Alat-alat Bengkel	92.730.000	1.432.000.000	1.524.730.000
BM Pengadaan Peralatan Kantor	2.141.936.500	1.953.163.000	4.095.099.500
BM Pengadaan Perlengkapan Kantor			-
BM Pengadaan komputer			-
BM Pengadaan Meubelair			-
BM Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	8.305.750.000	9.032.200.000	17.337.950.000
Belanja Gedung dan Bangunan	3.047.548.000	775.617.300	3.823.165.300
Belanja Aset lainnya		24.762.198	24.762.198
Jumlah	13.587.964.500	13.217.742.498	26.805.706.998

*) Rincian Belanja Aset Tetap Terlampir

Penambahan Aset Tetap karena adanya Koreksi :

Selama TA. 2011 ada koreksi penambahan aset tetap berupa tanah sebesar Rp. 1,800,000,000 dan bangunan diatas tanah sebesar Rp.200,000,000 yang menurut DPPAD Provinsi Jawa Tengah adalah milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, tetapi selama ini pihak Pengurus Barang RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo tidak mengetahui kalau tanah itu milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sehingga tidak dicatat sebagai aset, kemudian pada tahun 2009 lewat SK DPPAD No.038/594.3/10482/2009 dan telah di buat Sertifikat Hak Pakai No. 00049 Tanggal 08 Desember 2010, dan diakui sebagai aset oleh Pengurus Barang RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Pada Tahun 2011.

Surat Pernyataan dan Sertifikat Tanah terlampir.

Penambahan Koreksi Aset Tetap Berupa Tanah dan Bangunan :

Uraian	Jumlah
Tanah	1.800.000.000
Bangunan Terdiri dari :	
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	16.890.885
Bangunan Gedung	128.386.537
Instalasi	54.722.578
Jumlah	2.000.000.000

Penambahan koreksi Alat-alat kedokteran :

Uraian	Jumlah
Alat-alat Kedokteran	29.430.000
Jumlah	29.430.000

Penambahan Aset Tetap karena adanya HIBAH :

Penambahan aset yang berasal dari hibah Pemerintah KUBA berupa alat - alat kantor dan rumah tangga, alat-alat kedokteran dan alat-alat laboratorium sebesar Rp. 261,710,000 terdiri dari :

Uraian	Jumlah
Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.000.000
Alat-alat Kedokteran	228.710.000
Alat-alat Laboratorium	15.000.000
Jumlah	261.710.000

2. Penjelasan Mutasi Perubahan Pengurangan Aset Tetap selama 1 Januari s/d 31 Desember 2011

Dari hasil rekonsiliasi Pengurus Barang dengan Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah didampingi oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah, ada beberapa temuan yang menyebabkan berkurangnya nilai aset sebesar Rp. 17,214,100,981 antara lain :

a) Kesalahan penganggaran, barang habis pakai dianggarkan belanja modal sehingga terjadi double catat antara persediaan dan aset tetap.

BARANG HABIS PAKAI	UNIT	NILAI (Rp)
1. ALAT RUMAH TANGGA	860	100.729.500
2. ALAT KEDOKTERAN	1.617	248.807.175
4. ALAT LABORATORIUM	182	4.690.000
4. BENGKEL	15	460.000
JUMLAH	2.674	354.686.675

b) Reklasifikasi Aset Tetap yang sudah tidak produktif /rusak berat s.d Tahun 2003 ke Aset Lainnya :

BARANG ASET LAINNYA	UNIT	NILAI (Rp)
1. ALAT RUMAH TANGGA	8.432	522.461.686
2. ALAT KEDOKTERAN	6.161	14.072.276.734
3. ALAT STUDIO	79	125.389.886
4. ALAT LABORATORIUM	-	2.139.108.000
5. KESENIAN	4	78.000
JUMLAH	14.676	16.859.314.306

Mutasi Pengurangan Aset Tetap Tahun 2011 :

JENIS BARANG	HABIS PAKAI	ASET LAINNYA	TOTAL
Alat-alat Bengkel Alat Ukur	460.000	-	460.000
Alat Kantor dan Rumah Tangga	100.729.500	522.461.686	623.191.186
Alat-alat Studio		125.389.886	125.389.886
Alat-alat Kedokteran	248.807.175	14.072.276.734	14.321.083.909
Alat-alat Laboratorium	4.690.000	2.139.108.000	2.143.798.000
Barang Bercorak Kesenian/Budaya	-	78.000	78.000
Jumlah	354.686.675	16.859.314.306	17.214.000.981

c) Kekurangan catat terhadap nilai Alat Kedokteran :
Seharusnya 230.000.000
Tercatat 2.300.000
Selisih Kurang Catatan 227.700.000

d) Kelebihan catat terhadap nilai Aset Tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga :
Seharusnya 40.400.000
Tercatat 40.500.000
Selisih Lebih Catatan 100.000

e) Penambahan Biaya Panitia Pengadaan :
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 8.250.000
Panitia Pemeriksa Barang dab Jasa 5.500.000
13.750.000

*) Rincian Ringkasan & Jurnal Koreksi Terlampir

Penjelasan Perubahan Rekapitulasi Mutasi Barang Inventaris Per 31 Desember 2011 Antara Neraca Manual dengan SIMDA :

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	INPUT SIMDA
01.01	TANAH	105.738.750.000	-	105.738.750.000
02.	PERALATAN DAN MESIN	144.815.590.945	586.115.000	145.401.705.945
02.	a. Alat - alat Besar	2.344.028.000	298.052.521	2.642.080.521
03.	b. Alat - alat Angkutan	2.742.886.961	(130.105.000)	2.612.781.961
04.	c. Alat - alat Bengkel Alat Ukur	4.305.214.520	(2.054.548.520)	2.250.666.000
05.	d. Alat - alat Pertanian / Peternakan	-	26.410.500	26.410.500
06.	e. Alat - alat Kantor dan RT	27.879.216.412	(9.464.480.136)	18.414.736.276
07.	f. Alat - alat Studio dan Komunikasi	415.137.812	188.540.936	603.678.748
08.	g. Alat - alat Kedokteran	105.941.557.474	10.258.182.199	116.199.739.673
09.	h. Alat - alat Laboratorium	1.187.549.766	1.464.062.500	2.651.612.266
10.	i. Alat - alat Keamanan	-	-	-
03.	GEDUNG DAN BANGUNAN	99.854.080.137	-	99.854.080.137
11.	a. Bangunan Gedung	99.854.080.137	(10.000.000)	99.844.080.137
12.	b. Bangunan Monumen	-	10.000.000	10.000.000
04.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.895.045.958	(586.115.000)	2.308.930.958
13.	a. Jalan dan Jembatan	-	-	-
14.	b. Bangunan Air / Irigasi	-	175.000.000	175.000.000
15.	c. Instalasi	2.895.045.958	(764.155.000)	2.130.890.958
16.	d. Jaringan	-	3.040.000	3.040.000
	ASET TETAP LAINNYA	196.938.008	-	196.938.008
17.	a. Buku Perpustakaan	181.938.008	-	181.938.008
18.	b. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	15.000.000	-	15.000.000
19.	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-	-
	JUMLAH	353.500.405.048	-	353.500.405.048

Penjelasan Neraca Antara Manual dengan SIMDA adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
01.01	TANAH	105.738.750.000	-	105.738.750.000

Keadaan per 31 Desember 2011 pada neraca Manual Nilai Rp.105.738.750.000 sedangkan yang ada di INPUT SIMDA juga sama. Sehingga tidak ada perbedaan.

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
02.	a. Alat - alat Besar	2.344.028.000	298.052.521	2.642.080.521

Keadaan per 31 Desember 2011 pada Neraca Manual Nilai Rp. 2.344.028.000 sedangkan pada Input SIMDA Nilai Rp. 2.642.080.521 terdapat perubahan senilai Rp. 298.052.521 dengan rincian sebagai berikut :

Penambahan Reklas dari :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Bengkel	26.152.521
Alat-alat Rumah Tangga	181.800.000
Instalasi	1.107.600.000
Jumlah	1.315.552.521
Pengurangan Reklas ke :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Pertanian	24.750.000,00
Alat-alat Laboratorium	992.750.000,00
Jumlah	1.017.500.000,00
Jumlah Perubahan Reklas	298.052.521

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
03.	b. Alat - alat Angkutan	2.742.886.961	(130.105.000)	2.612.781.961

Perubahan sebesar (Rp 130.105.000) berasal dari Reklas Barang :

Penambahan Reklas dari :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Rumah Tangga	620.000
Jumlah	620.000

Pengurangan Reklas ke :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Rumah Tangga	130.725.000
Jumlah	130.725.000
Jumlah Perubahan Reklas	(130.105.000)

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
04.	c. Alat - alat Bengkel Alat Ukur	4.305.214.520	(2.054.548.520)	2.250.666.000

Perubahan sebesar (Rp 2.054.548.520) berasal dari Reklas Barang :

Penambahan Reklas dari :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Rumah Tangga	108.934.000
Jumlah	108.934.000

Pengurangan Reklas ke :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Besar	26.152.521
Alat-alat Rumah Tangga	1.177.500.000
Alat-alat Laboratorium	182.100.000
Instalasi	777.730.000
Jumlah	2.163.482.521
Jumlah Perubahan Reklas	(2.054.548.521)

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
05.	d. Alat - alat Pertanian / Peternakan	-	26.410.500	26.410.500

Perubahan sebesar Rp 26.410.500 berasal dari Reklas Barang :

Penambahan Reklas dari :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Besar	24.750.000
Alat-alat Rumah Tangga	1.660.500
Jumlah	26.410.500

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
06.	e. Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga	27.879.216.412	(9.464.480.136)	18.414.736.276

Perubahan sebesar (Rp 9.464.480.136) berasal dari Reklas Barang :

Penambahan Reklas dari :	Nilai (Rupiah)
Alat - alat Angkutan	130.725.000
Alat-alat Bengkel	1.177.500.000
Alat - alat Studio dan Komunikasi	199.132.414
Alat - alat Kedokteran	34.125.000
Instalasi	4.400.000
Jumlah	1.545.882.414

Pengurangan Reklas ke :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Besar	181.800.000,00
Alat - alat Angkutan	620.000,00
Alat-alat Bengkel	108.934.000,00
Alat-alat Pertanian	1.660.500,00
Alat - alat Studio dan Komunikasi	387.673.350,00
Alat - alat Kedokteran	10.296.724.700,00
Instalasi	27.000.000,00
Alat-alat Laboratorium	5.950.000,00
Jumlah	11.010.362.550,00
Jumlah Perubahan Reklas	(9.464.480.136)

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
07.	f. Alat - alat Studio dan Komunikasi	415.137.812	188.540.936	603.678.748

Perubahan sebesar Rp 188.540.936 berasal dari Reklas Barang :

Penambahan Reklas dari :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Rumah Tangga	387.673.350
Jumlah	387.673.350

Pengurangan Reklas ke :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Rumah Tangga	199.132.414,00
Jumlah	199.132.414,00
Jumlah Perubahan Reklas	188.540.936

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
08.	g. Alat - alat Kedokteran	105.941.557.474	10.258.182.199	116.199.739.673

Perubahan sebesar Rp 10.258.182.199 berasal dari Reklas Barang :

Penambahan Reklas dari :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Rumah Tangga	10.296.724.700
Alat-alat Laboratorium	12.000.000
Jumlah	10.308.724.700

Pengurangan Reklas ke :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Rumah Tangga	34.125.000
Alat-alat Laboratorium	16.417.500
Jumlah	50.542.500
Jumlah Perubahan Reklas	10.258.182.200

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
09.	h. Alat - alat Laboratorium	1.187.549.766	1.464.062.500	2.651.612.266

Perubahan sebesar Rp 1.464.062.500 berasal dari Reklas Barang :

Penambahan Reklas dari :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Besar	992.750.000
Alat-alat Bengkel	182.100.000
Alat-alat Rumah Tangga	5.950.000
Alat - alat Kedokteran	16.417.500
Instalasi	278.845.000
Jumlah	1.476.062.500

Pengurangan Reklas ke :	Nilai (Rupiah)
Alat - alat Kedokteran	12.000.000
Jumlah	12.000.000
Jumlah Perubahan Reklas	1.464.062.500

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
11.	a. Bangunan Gedung	99.854.080.137	(10.000.000)	99.844.080.137

Perubahan sebesar (Rp 10.000.000) berasal dari Reklas Barang :

Pengurangan Reklas ke :	Nilai (Rupiah)
Bangunan Monumen	10.000.000
Jumlah	10.000.000
Jumlah Perubahan Reklas	10.000.000

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
12.	b. Bangunan Monumen	-	10.000.000	10.000.000

Perubahan sebesar Rp 10.000.000 berasal dari Reklas Barang :

Penambahan Reklas dari :	Nilai (Rupiah)
Bangunan Gedung	10.000.000
Jumlah	10.000.000
Jumlah Perubahan Reklas	10.000.000

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
14.	b. Bangunan Air / Irigasi	-	175.000.000	175.000.000

Perubahan sebesar Rp 175.000.000 berasal dari Reklas Barang :

Penambahan Reklas dari :	Nilai (Rupiah)
Instalasi	175.000.000
Jumlah	175.000.000
Jumlah Perubahan Reklas	175.000.000

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
15.	c. Instalasi	2.895.045.958	(764.155.000)	2.130.890.958

Perubahan sebesar (Rp 764.155.000) berasal dari Reklas Barang :

Penambahan Reklas dari :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Bengkel	777.730.000
Alat-alat Rumah Tangga	27.000.000
Jumlah	804.730.000
Pengurangan Reklas ke :	Nilai (Rupiah)
Alat-alat Besar	1.107.600.000
Alat-alat Rumah Tangga	4.400.000
Alat-alat Laboratorium	278.845.000
Irigasi	175.000.000
Jaringan	3.040.000
Jumlah	1.568.885.000
Jumlah Perubahan Reklas	(764.155.000)

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
16.	d. Jaringan	-	3.040.000	3.040.000

Perubahan sebesar Rp 3.040.000 berasal dari Reklas Barang :

Penambahan Reklas dari :	Nilai (Rupiah)
Instalasi	3.040.000
Jumlah	3.040.000
Jumlah Perubahan Reklas	3.040.000

No.	Nama Barang	Keadaan Per 31 Desember 2011	Perubahan	Input SIMDA
17.	a. Buku Perpustakaan	181.938.008	-	181.938.008
18.	b. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	15.000.000	-	15.000.000
19.	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-		

Untuk Aset Tetap Lainnya Buku Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaa untuk keadaan per 31 Desember 2011 antara Neraca Manual dengan Input SIMDA sudah sama.

*) Lampiran Rincian Data Aset Tetap termasuk penjelasannya masing-masing aset ada di Laporan Pengurus Barang RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

5.1.4 KEWAJIBAN

Rp.5.807.075.475Rp.7.601.128.352

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu baik utang Jasa Pelayanan maupun Utang perhitungan pihak ketiga yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Rp.1.286.836.955Rp.-

Utang PPK adalah utang pajak yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2011	2010
- PPh Pasal 23	15.645.330	-
- PPh Final Pasal 4 ayat (2)	10.448.527	-
- PPh Pasal 22	147.683.001	-
- PPN dan PPnBM	1.113.060.097	
Jumlah	1.286.836.955	-

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai institusi pemerintah melakukan pembayaran atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Oleh karena itu sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 486/KMK.03/2003 maka bendaharawan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto bertindak sebagai "pemotong" PPh pasal 21 (pajak penghasilan yang diterima pegawai, karyawan, penerimaan honorarium sehubungan dengan pekerjaan). Disamping Pph Pasal 21, atas pembayaran untuk pembelian / penyerahan barang yang dibebankan ke APBN/APBD, Bendaharawan harus memungut PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, dengan tarif yang telah ditentukan, dihitung dari harga beli yang dipungut pada saat pembayaran. Lebih lanjut, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto juga berkewajiban menyetorkan pungutan PPN atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa. Semua jenis pajak terutang, sebagaimana disajikan di atas, maka bendaharawan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto wajib menyetorkan hasil pungutan atau potongan pajak ke kas Negara. Jumlah hutang pajak sebagaimana disajikan diatas, merupakan pajak yang dipungut melalui bendaharawan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo untuk bulan Desember 2011 yang akan disetorkan pada bulan Januari 2012.

2. Utang Jangka Pendek : Utang jasa pelayanan dan utang jangka pendek lainnya

Rp.4.520.238.520Rp.7.601.128.352

Utang Jasa Pelayanan ini merupakan jumlah jasa pelayanan untuk bulan Desember 2011 dan utang jangka pendek lainnya

Uraian	2011	2010
Utang Jasa Pelayanan	3.976.471.550	7.601.128.352
Utang Jangka Pendek Lainnya :		
Obat	15.696.450	
Laboratorium PK	218.191.820	
Bank Darah	186.887.800	
Pemeliharaan Peralatan Kedokteran	50.972.900	
Belanja Bahan dan Alat Sanitasi	2.647.000	
Kendaraan Dinas Operasional	48.871.000	
Makan Minum Pasien	20.500.000	
Jumlah	4.520.238.520	7.601.128.352

Jumlah beban yang masih harus dibayar tersebut merupakan beban RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk masa pemakaian bulan Desember 2011, dan oleh karenanya baru akan dilakukan pembayaran/ pelunasan pada bulan Januari 2012.

KETERANGAN

31 DESEMBER 2011

31 DESEMBER 2010

5.1.5 EKUITAS DANA

Rp.

417.299.147.450

Rp.

406.012.515.521

1. Ekuitas Dana Lancar

Rp.

43.480.084.589

Rp.

27.350.260.589

Uraian	2011	2010
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-
Kas Bendahara Pengeluaran pihak ketiga (non SILPA)	-	-
Pendapatan yang ditangguhkan	261.029.962	110.248.034
Cadangan Piutang	24.074.636.815	15.346.085.364
Cadangan Persediaan	23.664.656.332	18.433.290.234
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(4.520.238.520)	(6.539.363.043)
Jumlah	43.480.084.589	27.350.260.589

2. Ekuitas Dana Investasi

Rp.

353.500.405.048

Rp.

341.617.659.031

Uraian	2011	2010
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		
Diinvestasikan Dalam Aktiva Tetap	353.500.405.048	341.617.659.031
Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		
Jumlah	353.500.405.048	341.617.659.031

3. Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasi

Rp.

20.318.657.813

Rp.

37.044.595.901

Uraian	2011	2010
Diinvestasikan Dalam Dana Untuk Dikonsolidasi		
R/K Pemprov	60.540.585.133	67.134.471.319
Surplus th 2010	37.044.595.901	33.070.487.173
SILPA	(77.266.523.221)	(63.160.362.591)
Jumlah	20.318.657.813	37.044.595.901

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan berisikan Informasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas kerjasama dan koordinasinya kami sampaikan terima kasih.